

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL PRANCIS DAN REPUBLIK AFRIKA TENGAH

Selayaknya hubungan antara dua negara berdaulat, tentu saja terdapat sejarah yang mewarnai. Baik sejarah yang menjadi awal terjalinnya hubungan tersebut, maupun dinamika-dinamika yang mewarnainya. Hal tersebut juga berlaku pada hubungan bilateral antara Prancis dan Republik Afrika Tengah. Hubungan kedua negara yang diawali dari sejarah kolonialisme Prancis di Ubangi-Shari hingga akhirnya wilayah tersebut memperoleh kemerdekaannya dari Prancis menjadi hal yang menarik untuk diulas.

BAB II ini penulis akan menjelaskan sejarah dan dinamika-dinamika dalam hubungan antara pemerintah Prancis dan Republik Afrika Tengah. Baik hubungan dimasa kolonialisme, pasca kemerdekaan Republik Afrika Tengah, kerjasama dibidang ekonomi, militer, dan pendidikan. Di sini Prancis juga mermberikan bantuan-bantuan terhadap negara Republik Afrika Tengah.

A. Sejarah Hubungan Antara Prancis dan Republik Afrika Tengah

1. Masa kolonialisme Prancis di Republik Afrika Tengah

Hubungan Prancis dengan Republik Afrika Tengah telah dimulai sejak masa kolonial, ketika Republik Afrika Tengah masih dalam bentuk koloni Prancis yang bernama Ubangi-Shari yang diambil dari nama sungai Ubangi dan Chari, kemudian pada tanggal 1905 disatukan dengan Chad dengan nama baru Ubangi-Shari Chad. Pada tahun 1910 bergabung dengan Gabon dan Kongo dengan nama Afrika Ekuatorial Prancis dengan ibukota Brazzaville. Pada tahun 1920 Afrika Ekuatorial Prancis dibagi menjadi beberapa

koloni Prancis yaitu menjadi Ubangi-Shari, Chad, Gabon dan Kongo.

Pada masa pemerintahan kolonial Prancis di Ubangi-Shari, Prancis menyewakan lahan yang sangat luas pada perusahaan-perusahaan swasta Eropa untuk mendirikan perusahaan dan memberikan hak penuh untuk mengeksploitasi pribumi. Prancis sengaja melakukan hal tersebut agar tidak mengeluarkan uang dalam membangun fasilitas-fasilitas di Ubangi-Shari. Para pekerja asli pribumi dieksploitasi secara paksa baik pria maupun wanita untuk bekerja mengumpulkan karet liar, gading, dan kulit hewan. Mereka juga bekerja secara paksa di perusahaan-perusahaan swasta Eropa yang mengakibatkan mereka kekurangan makanan dan kelaparan. Akibat dari kekurangan makanan dan kelaparan membuat tingkat kematian meningkat di Ubangi-Shari atau Republik Afrika Tengah.

Selama perang dunia kedua Jendral Prancis Charles de Gaulle meminta bantuan kepada penduduk wilayah jajahan Prancis untuk ikut membantu pasukan Prancis dalam memerangi Pasukan Nazi Jerman, 3000 orang dari Ubangi-Shari menanggapi hal tersebut. Setelah perang mereka kembali ke tanah air mereka dengan rasa kebanggaan dan identitas nasional baru bukan lagi etnis. Setelah perang Dunia kedua, Jendral Charles de Gaulle mengorganisasi Uni Prancis dan membentuk dewan lokal baru yang terdiri dari orang-orang koloni Prancis dan segelintir orang Afrika. (BRITANNICA, The Colonial era, 2018)

Barthelemy Boganda merupakan perdana Menteri pertama dari daerah Ubangi Shari yang merupakan otonomi khusus dari daerah koloni Prancis. Sebelum daerah tersebut resmi menjadi negara Republik Afrika Tengah. Pada 1946 Barthelemy Boganda merupakan orang Afrika pertama yang menjadi anggota

didalam majelis nasional Prancis, Barthelemy menjabat sebagai Perdana Menteri Ubangi Shari dari 8 Desember 1958 hingga 29 Maret 1959 dan beliau merupakan seseorang yang sangat menentang rasisme dan kolonialisme, terutama kolonialisme yang dilakukan oleh Prancis. Barthelemy Boganda mendirikan sebuah partai yang bernama MESAN (*Mouvement pour l'Évolution Sociale de l'Afrique Noire*) untuk mengakomodir gerakan sosial yang bertujuan merubah keadaan warga kulit hitam Afrika dan menentang kolonialisme dan rasisme yang dilakukan oleh pihak Prancis.

Gambar 2.1 Barthelemy Boganda



Sumber: afrotourism.com

Pada tahun 1958, pemerintahan Prancis mulai untuk mempertimbangkan kemerdekaan bagi negara-negara yang menjadi wilayah jajahannya. Barthelemy Boganda mulai mengatur pertemuan dengan Perdana Menteri Prancis yaitu Charles de Gaulle. Kedua tokoh ini bertemu untuk membahas syarat-syarat kemerdekaan bagi Republik Afrika Tengah. Charles de Gaulle sebagai Perdana Menteri Prancis Menyetujui syarat-syarat dan

usulan-usulan yang diajukan oleh Barthelemy Boganda untuk kemerdekaan Republik Afrika Tengah. pada 1 Desember 1958 walaupun belum Resmi diberikan kemerdekaan oleh pihak Prancis, tapi Barthelemy Boganda telah mendeklarasikan negara Republik Afrika Tengah. Barthelemy Boganda pun ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama Bagi Republik Afrika Tengah. (BRITANNICA, Barthelemy Boganda, 2018)

2. Kemerdekaan Republik Afrika Tengah

Republik Afrika Tengah meraih kemerdekaannya pada 13 Agustus 1960 dari Prancis dengan presiden pertamanya David Dacko yang masih memiliki hubungan keluarga dari Barthelemy Boganda. David Dacko lahir pada 24 Maret 1930 di Bouchia, Moyen-Kongo, Afrika Ekuatorial Prancis (Republik Afrika Tengah). Dia menjadi Presiden Afrika Tengah Setelah kematian Barthelemy Boganda pada Maret 1959, dari tahun 1960 sampai 1965 dan 1979 sampai 1980. Prancis lebih mendukung David Dacko untuk menjadi Presiden Pertama Republik Afrika Tengah. Hal tersebut terbukti dengan Prancis membantu David Dacko untuk meraih kursi kepresidenan Republik Afrika Tengah dari saingan utamanya yaitu Abel Goumba. Prancis Menilai bahwa David Dacko lebih lunak dibandingkan Abel Goumba. Selanjutnya David Dakco menjadikan Republik Afrika Tengah sebagai negara dengan satu partai, yaitu partai MESAN (*Mouvement pour l'Évolution Sociale de l'Afrique Noire*). (Ubakui , Emeh, & Okoro, 2015)

B. Pengaruh Prancis dalam Politik Republik Afrika Tengah Pasca Kemerdekaan

1. *Barracuda Coup D'état*

Pada malam 20 September 1979, Bokassa digulingkan oleh pemerintah Prancis dengan

melancarkan operasi Militer “Barracuda”, ketika Bokassa berkunjung ke Libya. Operasi ini dilakukan sebuah pasukan khusus dari badan intelijen Prancis SDECE (sekarang DGSE) yang menyamar. dan bergabung dengan Pasukan Resimen Khusus Parasut Infanteri Marinir atau 1er RPIMa. Pasukan ini dipimpin oleh Kolonel Brancion Rouge, dan mendarat di bandara Internasional M’poko, Bangui. Dengan menggunakan pesawat angkut Transall.

Pasukan Prancis tersebut berhasil mengamankan bandara tanpa mendapat perlawanan. Kemudian disusul dengan kehadiran dua pesawat angkut militer Prancis dengan membawa 300 pasukan. Kemudian Kolonel Brancion Rouge mengirimkan sebuah pesan ke Kolonel Degenne untuk datang dengan Barracudanya (*code name* untuk delapan helikopter Puma dan pesawat Transall), yang lepas landas dari Bandara militer N’Djamena, Chad. Jam 12:30 malam pada 21 September, Dacko yang pro-Prancis memproklamakan kejatuhan Kekaisaran Afrika Tengah dan pemerintahan kembali ke Republik Afrika Tengah di bawah kepresidenannya. (FAMpeople, 2018)

2. Pemberontakan *Union of Democratic Forces for Unity* (UDFU)

Kelompok pemberontak ini dibentuk pada September 2006 di Birao, ibu kota wilayah Vakaga. Sebagai bentuk kekecewaan mantan rekan seperjuangan Francois Bozize yang dianggap melupakannya mereka. Pada waktu itu masih dipimpin oleh Abdoulaye Miskine, tetapi pada bulan Februari 2007 Abdoulaye Miskine atas nama *Union of Democratic Forces for Unity* (UDFU) menandatangani perjanjian damai dengan Francois Bozize di Sirte, Libya. Kemudian Damani Zacharia

ditunjuk oleh anggota kelompoknya yang menolak perjanjian damai tersebut sebagai pengganti Abdoulaye Miskine.

Pada 3 Maret 2007, Daman Zacharia melakukan penyerangan terhadap Pasukan Prancis di Birao yang telah ada sejak November 2006 dalam rangka mengamankan wilayah tersebut. Pasukan Prancis mendapat serangan artileri berat dari kelompok pemberontak. Dengan cepat Prancis mengirimkan Dua jet tempur *Mirage F1* dari Chad untuk membantu pasukan Prancis yang mendapat serangan. Pada tanggal 4 Maret 2007, Prancis mengirimkan 50 tentara dari Resimen Parasut Infanteri Marinir ke-3 yang diberangkatkan dari Bangui ke bandara yang berada di Birao untuk menyiapkan titik pendaratan bagi pesawat Transall dan Hercules yang membawa sekitar seratus pasukan Prancis. Tentara Republik Afrika Tengah dengan mudah memperoleh kembali kendali atas kota Birao dan sekitarnya karena mendapat dukungan peralatan dan logistik dari Prancis. Kalau bukan karena Prancis, pemerintahan Francois Bozize akan jatuh. (Munie, 2018)

C. Hubungan Prancis dan Republik Afrika Tengah Pasca Kemerdekaan.

1. Kerjasama Dibidang Ekonomi

Prancis menjadi investor terbesar di Republik Afrika Tengah. serta menjalin kerjasama disektor jasa dan bisnis, Seperti: diindustri manufaktur, perdagangan, dan layanan perbankan. Beberapa perusahaan Prancis yang berinvestor di Republik Afrika Tengah seperti contoh: *France Telecom, Areva dan Total* (produk minyak bumi). (Diplomatie, Relations bilatérales, 2018)

Gambar 2.2 Logo Orange



Sumber: Wikipedia

Pada 5 Desember 2007 di Bangui, Orange S.A yang sebelumnya adalah *France Telecom* telah menandatangani perjanjian dengan Republik Afrika Tengah untuk berkerjasama dalam bidang telekomunikasi dengan mendirikan Orange Centrafrique. Manajer umum perusahaan Orange Centrafrique, Mr. Bruno Allasonnière, mengatakan bahwa Orange Centrafrique akan diluncurkan pada 6 desember 2007. Dengan nilai investasi sebesar 23 juta Euro. (Soupou, 2018)

Pada 1 Agustus 2008, Orano yang dahulunya Areva (perusahaan milik negara Prancis yang bergerak di bidang nuklir) menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Republik Afrika Tengah untuk eksploitasi uranium di Bakouma, bagian Timur Republik Afrika Tengah, perjanjian ini di tandatangani oleh kepala eksekutif Orano yaitu, Anne Lauvergeon dan Francois Bozize dengan durasi kontrak 40 tahun dan bernilai 40 juta *Dolllar*. Republik Afrika Tengah akan mulai mengirimkan uranium pada 2010.

Gambar 2.3 Logo Orano



Sumber : Nuclear Street

Kesepakatan itu mengakhiri gesekan antara Orano dan Republik Afrika Tengah. sebelumnya Republik Afrika Tengah menyerahkan hak penambangan kepada perusahaan Inggris-Kanada yaitu UraMin pada 2006, atas ketidakpuasan pemerintah Republik Afrika Tengah yang mengatakan penjualan Uranium tidak teratur dan mengabaikan hak dan kepentingan dari orang-orang Republik Afrika Tengah. Kemudian Orano membeli UraMin pada bulan Juli 2007. (Writers, 2008)

Franc Zone berdiri pada 1973 dan merupakan organisasi moneter bagi negara-negara bekas jajahan kolonial Prancis di benua Afrika yang beranggotakan 14 negara yaitu: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo, Guinea Khatulistiwa, Guinea Bissau, Gabon, Pantai Gading, Mali, Niger, Senegal, dan Togo. Franc Zone juga membuat mata uang bersama bagi seluruh anggotanya, yaitu CFA Franc. Franc zone sendiri terbagi kedalam dua zona yaitu, the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) dan the Central African Economic and Monetary Union (CAEMC).

Pada Januari 1994, 100 CFA Franc sama dengan 1 *franc* Perancis, tetapi pada tahun 1999 Prancis bergabung ke Uni Eropa yang membuat mata uang Prancis yaitu Franc Prancis digantikan ke Euro yang merupakan mata uang Uni Eropa, hal tersebut menjadikan 1 euro sama dengan 655.957 CFA franc. Keuntungan yang didapat oleh Republik Afrika Tengah bergabung kedalam Franc Zone adalah produk-produk negara-negara anggota Franc Zone, seperti Republik Afrika Tengah menjadi lebih kompetitif di pasar dunia. Mereka telah meningkatkan nilai ekspor dan meningkatkan keseimbangan perdagangan mereka. Dalam proses revitalisasi industri-industri seperti pertanian dan tekstil. Perdagangan antara negara-negara anggota CFA franc juga meningkat. (Fund, 2018)

2. Kerjasama Dibidang Militer Dan Politik

Pada 8 April 2010 di Bangui Menteri Sekretaris Negara Perancis untuk Kerja, Sama Alain Joyandet telah menandatangani perjanjian militer dengan Menteri Luar Negeri Republik Afrika Tengah, Antoine Gambi. Dalam perjanjian itu Prancis menyatakan akan berkontribusi untuk mendukung restrukturisasi dan pelatihan angkatan bersenjata Republik Afrika Tengah dan juga akan mempromosikan terbentuknya pasukan penjaga perdamaian Afrika. Perjanjian militer yang baru untuk merivisi perjanjian militer yang lama. Karena dianggap sebagai salah satu cara Prancis untuk membela "teman" rezim Afrika yang dalam kesulitan. Walaupun klasul perjanjian yang lama tetap dirahaskan. (Jeuneafrique, 2018)

Pada 18 April 2014 di Bangui. Duta Besar Prancis, Charles Malinas dan Presiden Otoritas Pemilu Nasional (ANE) Republik Afrika Tengah, Dieudonne Kombo Yaya telah menandatangani sebuah perjanjian. Dimana Prancis dan Otoritas Pemilu Nasional (ANE)

Republik Afrika Tengah Bersama-sama berkomitmen untuk menyukseskan pemilu di Republik Afrika Tengah. Prancis melakukan berbagai upaya. Seperti akan mengambil alih renovasi bangunan untuk tempat pemilu yang ditugaskan kepada lembaga ini oleh pemerintahan Transisi dan membangun kantor pusat untuk Lembaga ini, Prancis juga telah mengiibah sekitar € 150.000 untuk rehabilitasi Gedung dan Prancis juga mengibahkan uang sebesar € 52.000 untuk biaya operasional Lembaga ini. (centrafricaine, La France appuie les efforts de l’Autorité nationale des élections, 2018)

3. Kerjasama Dibidang Pendidikan Dan Sosial

Pada tahun 2012 Prancis dan Republik Afrika Tengah Bersama-sama membentuk *Laboratoire d’economie rurale et de securite alimentaire* (LERSA) suatu kerjasama yang bertujuan untuk menyatukan dan menciptakan para peneliti, guru dan siswa agar menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompeten di Republik Afrika Tengah. Kegiatan ini diawasi secara langsung oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari Universitas Bangui dan juga di bantu oleh para ahli dari dari Universitas Lille, Prancis. Operasi dan kegiatan ini menghabiskan dana sebanyak € 136,000 dan dibiayai langsung oleh Kedutaan Prancis di Bangui. Upacara peresmian ini juga di hadiri oleh Charles Malinas duta besar Prancis untuk Republik Afrika Tengah dan Wakil Rektor Universitas Bangui. (centrafricaine, Le 28 octobre 2014 s’est déroulée à Bangui la cérémonie d’inauguration du Laboratoire, projet financé par l’Ambassade de France., 2018)

Pada 30 Agustus 2014, Prancis melalui kedutan Prancis di Bangui yang diwakilkan oleh Romain Vuillaume dan Menteri Pendidikan Republik Afrika Tengah Gisele Bedan telah menandatangani perjanjian *quadripartite*. Perjanjian *quadripartite* berisikan

beasiswa bagi Dua mahasiswa Republik Afrika Tengah yang berkesempatan untuk belajar di Prancis. Mereka adalah Claver Bomba Ndinda dan Abdias Giranone yang akan menempuh Pendidikan di IUTs Le Havre dan Thionville. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Gilles Potolot perwakilan dari Kelompok Serikat Buruh Republik Afrika Tengah, Stephane Lauwick perwakilan dari IUTs Le Havre. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia dibidang teknologi yang dibutuhkan oleh Republik Afrika Tengah selama periode rekonstruksi dan pembangunan Negara ini. (centrafricaine, Signature d'une convention d'engagement pour des bourses DUT, 2018)

4. Bantuan Prancis kepada Republik Afrika Tengah.

Perancis telah memberikan lebih dari 76 juta Euro untuk bantuan sipil di Republik Afrika Tengah pada kurung waktu 2014 sampai 2016 Selain pengeluaran operasi militer. Pada 17 November 2016, Konferensi di Brussel, Perancis mengumumkan akan memberikan bantuan sebanyak 85 juta Euro selama 3 tahun, tujuan Konferensi ini adalah membantu pemerintah memulihkan perdamaian keamanan, dan menghidupkan kembali perekonomian di Republik Afrika Tengah. Pada tahun 2017, Prancis telah memberikan bantuan Lebih dari 38 juta Euro untuk memfokuskan dukungannya pada pemulihan pemerintahan, pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan dan kesehatan di Republik Afrika Tengah. (Diplomatie, Relations bilatérales, 2018)